

DAMPAK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT MIKRO DI KELURAHAN MADIDIR WERU KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG

HENDRIKA PUTRI MARSITA DEWI

FLORENCE DAICY LENGKONG

VERY Y. LONDA

hendrikadewi180888@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of micro-community business development policies in Madidir Weru Village, Madidir District, Bitung City. This type of research used in this study is qualitative research. The theory used is based on five dimensions, namely: the impact of policy on public problems and the impact of policy on the people involved, the impact of the policy on circumstances and groups outside the goals or objectives of the policy, the impact of the policy on the present and the future, the direct costs incurred and indirect costs borne by the community. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation, data obtained from various sources were obtained and then analyzed into a conclusion. The results of this study that the impact of policies on micro-business development based on capital, marketing, human resource capabilities and technological limitations in terms of the impact of policies on public problems and the impact of policies on people involved, the impact of policies on circumstances and groups outside the target or policy objectives, the impact of the policy on the present and future conditions, the direct costs incurred and the indirect costs borne by the community shown in the program in the form of venture capital have a successful and successful impact on the development of microbusiness communities. However, there is a need for community initiatives to find information about existing programs and are being carried out by the government to develop businesses.

Keywords: Policy Impact, Business Development, Micro Society.

PENDAHULUAN

Pengembangan usaha mikro di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi Nasional. Selain karena usaha mikro merupakan tulang punggung dalam sistem perekonomian kerakyatan yang tidak hanya ditunjukkan untuk mengurangi masalah kesenjangan seperti kemiskinan dan pengangguran. Perekonomian berbasis usaha mikro lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja serta modal yang digunakan relatif kecil. Usaha mikro mempunyai peranan yang penting salah satunya di Kota Bitung karena perekonomian berbasis usaha mikro ini mampu meningkatkan daya saing kreatifitas bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas bagi Kota Bitung tepatnya di Kelurahan Madidir Weru dari hasil produksinya dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dihalangi oleh banyak hambatan seperti keterbatasan modal yang merupakan faktor utama yang perlu untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM dikarenakan pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan yang masih mengandalkan modal dari pelaku usaha yang jumlahnya terbatas. Sedangkan bantuan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif yang diminta tidak dapat dipenuhi. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah adalah masalah pemasaran. Dengan adanya pemasaran yang menggunakan strategi yang baik maka penjualan akan meningkat seperti penggunaan teknologi dalam mempromosikan suatu barang. Namun pemasaran yang sering dihadapi seperti

tekanan-tekanan persaingan dari luar membuat para pelaku usaha harus lebih mempertahankan usahanya agar terhindar dari persaingan-persaingan yang tidak sehat.

Dalam pengembangan suatu usaha kemampuan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memahami mengembangkan suatu usaha baik dalam hal keuangan dan pengetahuan tentang teknologi. Namun pola kemampuan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan sulit ditemukan antara lain karena kurangnya pengetahuan dan manajerial *skill* pelaku usaha mikro. Seperti pemisahan antara manajerial keuangan perusahaan dan keluarga belum dilakukan sehingga mengalami kesulitan terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan teknologi menjadi kendala dalam mengembangkan barang yang di produksi oleh pelaku usaha. Usaha mikro di Kelurahan Madidir Weru kebanyakan masih menggunakan teknologi yang bersifat tradisional dan manual dalam memproduksi barang. Teknologi juga dapat membantu dan mempermudah di dalam usaha industri rumah tangga. Namun kenyataannya keterbatasan teknologi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti modal usaha dalam membeli mesin-mesin baru untuk memproduksi sulit untuk diperoleh, kurangnya informasi mengenai perkembangan teknologi dan keterbatasan sumber daya manusianya yang dapat memahami penggunaan teknologi tersebut, kebanyakan pelaku usaha yang sudah rentan sulit menggunakan teknologi. Keberadaan UMKM ini perlu untuk dikembangkan karena pengembangan ini akan berdampak dan penting terhadap peningkatan prekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut William N. Dunn (2003: 132), kebijakan public (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (Inu Kencana 2007:106) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintahan, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu. Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah atau suatu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama dengan pilihan pemerintah melakukan sesuatu walaupun tidak melakukan tindakan namun dapat berdampak pada sarsaran kebijakan.

Dampak Kebijakan menurut Thomas Dye dalam (Winarno 2016: 197) mengatakan dampak kebijakan memiliki beberapa dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur lainnya, yaitu biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Menyangkut biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Dampak kebijakan publik akan timbul dalam sebuah kebijakan pemerintah yang

tentu mengundang banyak sisi, banyak aspek atau banyak sudut pandang. Selain itu, kebijakan pemerintah itu dibuat dan diterbitkan oleh sebuah lembaga atau pejabat pemerintah yang akan dilihat dan dirasakan hasilnya oleh sasaran kebijakan.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu aktivitas ekonomi rakyat yang bersekala kecil sesuai kriteria yang ditentukan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan modal dalam mengembangkan usahanya. Menurut Sukirno (2004: 365) UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil atau terbatas, nilai modal atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 2012:2).

Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Menurut (Afifuddin, 2010: 180) mengemukakan bahwa pengembangan usaha mikro kecil dan menengah lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Menurut Mulyadi Nitisusanthro (2010: 270) pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing sebuah usaha.

Masyarakat menurut Edi Suharto (2006:11) adalah area dimana praktek pekerjaan sosial makro berproses. Berdasarkan pendapat dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang hidup dan adanya hubungan kontak sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Moleong (2007:6) Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat pelaku usaha mikro 8 orang, pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung serta Lurah Kelurahan Madidir Weru berjumlah 2 orang.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Tahapan analisis dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi/ menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri untuk dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang mampu berdaya saing yang di dukung oleh pemerintah melalui upaya-upaya kebijakan dan program untuk mengembangkan usaha. Usaha mikro merupakan salah satu sektor usaha yang mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat karena setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama

dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Etni D. Seran, Arie J. Rorong dan Very Y. Londa (2017) tentang pengaruh pemerdayaan usaha kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat kabupaten Minahasa. Pada hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya UKM di Kecamatan Tompaso Barat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terlebih juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap desa. Pelaku usaha kecil dan menengah mampu mengelolah usaha dengan menunjang potensi atau kemampuan diri pelaku usaha, maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat.

Adapun permasalahan yang di hadapi berupa terbatasnya permodalan, kualitas sumber daya manusia dan perkembangan teknologi, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masalah yang di hadapi peneliti pada modal dan kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dan pemasaran yang akan berdampak pada perkembangan usaha mikro. Untuk itu dibutuhkan juga dukungan dan bimbingan dari pemerintah kepada pelaku-pelaku usaha.

Untuk mengetahui dampak kebijakan pengembangan usaha masyarakat mikro di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung, maka peneliti menggunakan 5 dimensi dampak kebijakan menurut Thomas Dye dalam (Winarno 2016: 197) yaitu:

- 1) Dampak pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Pemerintah telah memberikan bantuan yang dikeluarkan berupa dana bergulir sebesar Rp 15.000.000 dan dana pemula sebesar Rp 13.000.000 dengan syarat dan ketentuan yang diberikan. Bantuan lainnya berasal dari Bank dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat)

mikro dengan bunga 7% dan disalurkan dengan jumlah Rp 25.000.000. Dengan adanya kebijakan pengembangan usaha dalam bantuan dana dapat mengurangi masalah-masalah publik yang terjadi seperti tingkat kesejahteraan dan pendapatan. Permasalahan permodalan masih menjadi faktor utama yang diperlukan dalam mengembangkan usaha karena sebagian dari informan yang di dapat masih menggunakan modal pribadi untuk menjalankan usaha. Sedangkan pada penerima bantuan KUR mikro memberikan dampak pengembangan usaha yaitu wilayah pemasaran yang semakin luas dan omset penjualan yang optimal. Sebagaimana para pelaku usaha mikro tidak menerima dan menggunakan bantuan dari yang pemerintah keluarkan jumlah pelaku usaha mikro di Kelurahan Madidir Weru yang menggunakan bantuan dari program pemerintah 2 orang yaitu berupa dana usaha dan bantuan peralatan untuk usaha dan yang tidak menerima bantuan berjumlah 6 orang. Hal ini di akibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan pelaku usaha untuk mengikuti program kebijakan yang ada menyebabkan usaha mikro tidak dapat mengarahkan pengembangan usaha secara jelas dan fokus.

- 2) Dampak kebijakan pada keadaan dan kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Dilihat dari pemberian program atau kebijakan yang ada dalam pengembangan usaha mikro akan berdampak pada kondisi perekonomian pelaku usaha menjadi lebih berkembang dan dapat memperluas wilayah pemasaran yang dibantu dengan teknologi yang semakin canggih serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat memahami strategi pemasaran yang tepat. Hanya saja kebijakan pengembangan usaha dalam bentuk modal usaha tidak semua para pelaku

menerima bantuan sehingga tujuan kebijakan yang seharusnya dapat mengembangkan usaha melalui bantuan modal belum dirasakan seluruh masyarakat pelaku usaha mikro Kelurahan Madidir Weru hal ini di akibatkan karena kurangnya informasi serta sosialisasi yang di dapat mengenai bantuan yang diberikan. Namun pelaku usaha dapat mengembangkan usaha sendiri melalui kemampuan sumber daya yang dimiliki hingga usaha dapat berkembang. Salah satu pendukung pengembangan usaha yaitu wilayah strategis yang berdekatan langsung dengan jalan utama yang membuat masyarakat dapat lebih mudah menjangkau.

- 3) Dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan adanya program kebijakan bantuan dana dan peralatan mengenai dampak yang timbul berdasarkan dimensi waktu dalam mengembangkan usaha sehingga dari segi pemasaran yang awalnya hanya di lingkungan sekitar dapat lebih memperluas wilayah usahanya, dari program kebijakan ini memberikan dampak pada pengembangan usaha. Disisi lain dengan adanya kebijakan yang ada pemerintah daerah bersama para pelaku usaha mengharapkan kedepannya dalam periode beberapa bulan adanya partisipasi pada pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya agar dapat berdaya saing dengan usaha menengah. Pemerintah terus melakukan upaya kedepannya dalam memberikan bantuan berupa dana dan sosialisasi dalam mengembangkan usaha. Selain dapat membangun pertumbuhan ekonomi daerah dengan pengembangan usaha dapat meningkatkan pendapatan, taraf kesejahteraan sosial serta dapat memperluas lapangan pekerjaan.
- 4) Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa. Dalam hal pembiayaan dari kebijakan yang ada sumber dana yang di dapat dari Bank BRI dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro sebesar Rp 25.000.000 biaya ini sebagian besar digunakan pelaku usaha untuk menambah modal agar menciptakan kualitas produk dan membantu biaya pemasaran ke luar daerah. Bantuan dana bergulir dan dana pemula dari Dinas Koperasi dan UKM juga memberikan bantuan dana sebesar Rp 15.000.000 untuk dana bergulir dan Rp 13.000.000 untuk dana pemula. Pemberian dana ini memiliki syarat seperti memberikan laporan keuangan agar dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung dapat mengontrol program yang sedang di jalankan berjalan sesuai tepat sasaran, namun menurut pelaku usaha mikro di Kelurahan Madidir Weru belum ada yang menggunakan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung. Permasalahannya ada pada minimnya informasi yang di dapat mengenai kebijakan pengembangan usaha yang sedang di jalankan.
- 5) Biaya tidak langsung yang di tanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Adanya kecemburuan sosial yang timbul pada masyarakat usaha mikro dimana pemberian bantuan yang tidak merata terhadap pelaku-pelaku usaha mikro di Kelurahan Madidir Weru yang lebih membutuhkan bantuan dari modal usaha hingga sosialisasi mengenai pengembangan usaha. Biaya ketidakpuasan, akibat pelayanan informasi yang kurang dari pemerintah mengenai kebijakan yang diberikan dan sedang di jalankan seperti memberi informasi adanya bantuan

sosialisasi dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima bantuan pengembangan usaha. Hal ini dapat berdampak pada masyarakat usaha mikro untuk mengembangkan usahanya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sesuai dengan dimensi-dimensi dampak kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dampak kebijakan dalam pengembangan usaha dalam bentuk modal usaha berdampak dan berhasil pada pengembangan usaha masyarakat mikro karena sangat efektif untuk meningkatkan produktifitas usaha dalam rangka mengembangkan usaha yang berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha, karena dengan bantuan modal pelaku usaha dapat meningkatkan hasil produksi, mengembangkan jangkauan pemasarannya dan tempat usaha yang berdampak pada perkembangan usaha. Masalah pada keterbatasan teknologi dan pemasaran di Kelurahan Madidir Weru sudah dapat diatasi, karena kemampuan sumber daya manusia yang sudah dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman saat ini selain itu di akibatkan juga dengan lokasi pemasaran yang strategis. Kebijakan yang diberikan kepada masyarakat usaha mikro belum di rasakan semuanya karena kurangnya informasi yang di dapat oleh pelaku usaha mengenai kebijakan pengembangan usaha yang sedang di jalankan.
2. Dampak kebijakan pada keadaan dan kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Program atau kebijakan pengembangan usaha dalam bantuan modal, peralatan usaha berdampak pada kualitas produk, kepuasan masyarakat, kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan usahanya yang menyebabkan wilayah pemasaran akan semakin luas yang berdampak pada perkembangan usaha masyarakat mikro kedepannya.
3. Dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan di masa yang akan datang. Kebijakan pengembangan usaha mikro sudah ada dan dijalankan sesuai tujuan kebijakan yaitu pada pengembangan usaha mikro, namun dalam pengembangan usaha kedepannya tetap membutuhkan bantuan modal produktif yang saat ini masih sulit diakses oleh pelaku usaha karena dengan tersedianya akses pada sumber permodalan usaha mikro dapat berkembang secara mandiri tanpa harus terus bergantung pada pemerintah.
4. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa. Bantuan dana dari KUR mikro langsung di keluarkan oleh Bank bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp 25.000.000 sudah dapat membantu untuk mengembangkan usaha mikro. Pemerintah dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung telah memberikan bantuan dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp 15.000.000 kemudian dana pemula yang di keluarkan sebesar Rp 13.000.000 dan sosialisasi yang dapat menunjang para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.
5. Biaya tidak langsung yang di tanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Adanya kecemburuan sosial yang timbul antara pelaku usaha yang belum menggunakan atau

mendapatkan bantuan, hal ini diakibatkan kurangnya informasi yang di terima dari pelaku usaha mikro mengenai kebijakan yang ada untuk pengembangan usaha.

SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah agar pelaku usaha dapat menerima informasi dengan jelas mengenai bantuan yang ada.
2. Tingkatkan peran pemerintah mengenai kebijakan atau program yang sedang di jalankan agar pemberian bantuan dapat diberikan secara merata di seluruh wilayah.
3. Perlu adanya inisiatif masyarakat untuk mencari informasi mengenai kegiatan atau program yang ada dan sedang di jalankan oleh pemerintah.
4. Diperlukan pemberian bantuan permodalan secara kredit dari pemerintah daerah yang lebih mudah untuk diakses usaha mikro.
5. Perlu membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah dengan melakukan survei pada kebutuhan pelaku usaha serta merealisasikannya dalam bentuk kegiatan atau evaluasi kebijakan mengenai pengembangan usaha masyarakat mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nitisusantro, M. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Seran, E. D., A. J. Rorong dan V. Y. Londa. 2017. Pengaruh Pemerdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*. 3 (46).
- Suharto, E. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Raflika Aditama.
- Syafii, I. K. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukirno, S. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, T. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Caps Publishing.